



Analisis CSIS

Stabilitas Geopolitik dan Diplomasi Perdamaian

Dilema Filipina, Vietnam dan Thailand di Tengah Rivalitas AS-China

M. Mu'adz Havidz Ridlo & Alifa Azwadina

Sikap Lunak OKI terhadap China
dan Isu Pelanggaran HAM Muslim Uighur

M. Tri Andika & Elcy Damayani

Diplomasi Perdamaian dan Kemanusiaan Indonesia
di Era Joko Widodo

Mohamad Rosyidin

Jaringan Advokasi Keuskupan Dili dalam Referendum Timor Timur

Syera Anggreini Buntara & Teuku Rezasyah

Opsi *Judicial Preview* bagi Mahkamah Konstitusi:
Sebuah Rekonstruksi Ketatanegaraan

Dominique Nicky Fahrizal

Resensi Buku:
The Narrow Corridor: States, Societies, and The Fate of Liberty

Daron Acemoglu & James A. Robinson

Analisis Peristiwa

Amelinda Bonita Leonard
Deni Friawan, Lestari Jakara Barany & Ega Kurnia Yazid
Rocky Intan

Sikap Lunak OKI dalam Pelanggaran HAM Kelompok Muslim Uighur

M. TRI ANDIKA & ELCY DAMAYANI

Abstrak

Pelanggaran hak azasi manusia (HAM) terhadap Muslim Uighur dalam reeducation camp Xinjiang telah mengundang sorotan internasional. Laporan Amnesty Internasional menyebutkan bahwa kebijakan Beijing di reeducation camp, yang mengatasnamakan program pemberantasan ekstremisme, terorisme, dan radikalisme, dalam implementasinya merupakan kebijakan yang melanggar prinsip-prinsip HAM, terutama bagi Muslim Uighur. Kecaman dunia pun meluas. 22 negara yang merasa prihatin dengan situasi di Xinjiang, melayangkan kecaman terhadap kebijakan Beijing. Namun menariknya, OKI sebagai organisasi internasional terbesar yang terbentuk atas dasar solidaritas muslim dunia, justru menunjukkan sikap yang lunak. Tulisan ini fokus pada sebuah pertanyaan; bagaimana respon Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terhadap kebijakan reeducation camp pemerintah China yang sangat diskriminatif terhadap Muslim Uighur di Xinjiang? Argumennya, lunaknya sikap OKI atas perlakuan pemerintah China terhadap komunitas Muslim Uighur di Xinjiang dipengaruhi setidaknya oleh dua hal. Pertama, faktor hubungan tradisional yang sudah terjalin cukup lama antara OKI dan China, terutama dalam kesamaan posisi atas agenda perjuangan Palestina. Kedua, faktor kerja sama ekonomi yang dimiliki China dengan negara-negara anggota OKI.

Kata kunci: Uighur, China, OKI, Arab, Timur-Tengah

Pengantar

Kebijakan *re-education camp* pemerintah China di Xinjiang, telah mengundang perhatian masyarakat internasional. Kecaman dunia internasional terhadap China pun meluas, dikarenakan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di dalam *re-education camp* tersebut yang dialami oleh Muslim Uighur. Menteri luar negeri Amerika Mike Pompeo, misalnya, mengancam keberadaan *re-education camp* dan kebijakan Beijing soal pembatasan keyakinan terhadap komunitas Muslim Uighur di Xinjiang. Kecaman secara kolektif juga datang dari 22 negara pada Juli 2019 kepada PBB pada rapat dengar pendapat di Badan HAM PBB.¹ 22 negara tersebut meminta Beijing agar menghentikan penahanan semena-mena terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Bahkan, untuk memverifikasi dugaan pelanggaran HAM tersebut secara langsung, Kepala Badan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Komisi HAM PBB), Michelle Bachele, mendorong agar pemerintah China membuka akses internasional ke Xinjiang. Akan tetapi, permintaan tersebut ditolak oleh Beijing.

Namun demikian, sikap yang bersebarangan justru ditunjukkan oleh 37 negara dan pada waktu yang bersamaan, ke 37 negara mengirimkan surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan sikap pembelaannya kepada pemerintah China atas kebijakan *re-education camp* di Xinjiang. Pembelaan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa *re-education camp* yang didirikan adalah bagian dari upaya China untuk mengatasi problem terorisme, ekstrimisme, dan separatisme yang juga menjadi ancaman bagi setiap negara manapun. Menariknya, lebih dari setengah negara yang membela kebijakan *re-education camp* tersebut adalah negara-negara yang tergabung di dalam *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC) atau OKI (Organisasi Kerja Sama Islam). Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, beberapa negara sponsor OKI yang justru turut membela kebijakan China. Tidak heran, jika respon OKI terhadap kebijakan *re-education camp* Beijing, mencerminkan sikap negara-negara anggotanya.

Lunaknya respon OKI terhadap perlakuan diskriminatif yang dialami Muslim Uighur tentunya mengundang tanda tanya besar. Sebagai organisasi yang membawa semangat solidaritas muslim dunia, sikap OKI terhadap perlakuan diskriminatif pemerintah China terhadap Muslim Uighur, dipandang tidak cukup memadai. Tidak hanya itu, pertanyaan juga timbul

1. "Nearly two dozen countries unite at UN to condemn China's mass detention of one million Muslims for first time," 10 Juli 2019, Tersedia di <https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-muslim-detention-centres-xinjiang-un-security-council-letter-a8999236.html>, diakses pada 12 Maret 2019.

terhadap lunaknya sikap OKI yang disebabkan oleh riwayat panjang OKI dalam penyelesaian tindakan diskriminatif umat Islam di berbagai negara. Seperti konflik di Thailand Selatan, Bosnia, hingga Filipina. Dalam isu Uighur, OKI mengambil sikap yang berbeda dan memunculkan spekulasi terhadap peran OKI yang sudah tidak lagi relevan dalam merespon isu marginalisasi yang dialami masyarakat Muslim di dunia.

Di tengah derasnya kecaman masyarakat internasional atas pelanggaran HAM yang dilakukan China terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, termasuk dari umat Islam di Indonesia, OKI justru bersikap sangat lunak. Padahal, seharusnya seperti dalam Pasal 1 ayat 16 Piagam OKI, seharusnya organisasi ini membawa semangat solidaritas umat muslim dunia, memiliki tanggung jawab moral dan politik, sekaligus terlibat aktif dalam permasalahan umat Muslim yang menjadi kelompok minoritas di *non-member states*.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini fokus pada sebuah pertanyaan utama; bagaimana respon Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terhadap kebijakan *reeducation camp* pemerintah China yang sangat diskriminatif terhadap Muslim Uighur di Xinjiang? Faktor apa saja yang dapat menjelaskan pilihan sikap OKI? Artikel ini berargumen bahwa lunaknya sikap OKI terhadap pemerintah China dalam isu di Xinjiang dipengaruhi setidaknya oleh dua hal. Pertama, faktor hubungan tradisional yang sudah terjalin cukup lama antara OKI dan China, terutama dalam kesamaan posisi pada isu Palestina. Kedua, faktor kerja sama ekonomi China dengan negara-negara anggota OKI. Dalam prinsip pembangunan damai atau “developmental peace” yang diutamakan China dalam hubungan ekonomi di Timur Tengah, menjadi kerangka nilai yang membatasi tindakan apapun, yang dapat mencederai kerja sama ekonomi. Untuk sampai pada argumentasi tersebut, pada bagian selanjutnya artikel ini membahas tentang gelombang kecaman masyarakat internasional terhadap isu pelanggaran HAM yang dialami Muslim Uighur dalam kebijakan *reeducation camp* termasuk lunaknya respon OKI terhadap masalah tersebut.

***Reeducation Camp* dan Dugaan Pelanggaran HAM**

Meski bukan permasalahan baru, dugaan adanya pelanggaran HAM di Xinjiang kembali menarik perhatian dunia, terutama setelah 22 April 2018, sebuah satelit milik Google Earth menangkap aktivitas yang tidak biasa di wilayah Dabancheng, Urumqi. Beijing menamakan kompleks tersebut sebagai *reeducation camp*, fasilitas vokasional yang ditujukan bagi mereka

yang terlibat dalam gerakan terorisme, ekstrimisme, dan separatisme.² Kamp re-edukasi tersebut diakui merupakan bagian dari implementasi kebijakan Pemerintah China yang dinamakan *Xinjiang Uyghur Autonomous Region on De-extremification*. Regulasi ini diadopsi pada pertemuan ke-28 Komite Tetap Kongres Rakyat ke-12 untuk wilayah otonomi Uighur Xinjiang pada 29 Maret 2017.³ Kebijakan ini menjadi payung hukum bagi Pemerintah China dalam menyelenggarakan program re-edukasi terhadap etnis Uighur dan minoritas lainnya tanpa perlu adanya pengadilan.

Isu pelanggaran HAM di dalam *re-education camp* tersebut pun tersebar⁴. Hal ini dipicu oleh sebuah laporan Amnesty International pada September 2018 yang berjudul "*China Where are they? Time for answers about mass detentions in Xinjiang Uyghur Autonomous Region*". Dalam laporan tersebut, Amnesty Internasional menegaskan bahwa otoritas China telah menahan sekitar 1 juta orang Muslim Uighur. Namun, berdasarkan laporan UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD Committee), pada Mei 2018, diperkirakan jumlah total tahanan di kamp re-edukasi tersebut berjumlah lebih dari satu juta orang.⁵ Pihak Beijing, menurut Amnesty Internasional, menempatkan Muslim Uighur di sebuah tempat penampungan layaknya kamp konsentrasi, bukan kamp edukasi sebagaimana yang kerap dipropagandakan oleh otoritas China. Amnesty Internasional menyebut kebijakan Beijing tersebut sebagai tindakan penahanan massal, pengawasan intrusif, indoktrinasi politik, dan asimilasi paksa terhadap etnis Uighur serta kelompok etnis lainnya.

Tidak hanya itu, masih menurut catatan *Amnesty International*, di kamp tersebut orang-orang yang ditahan tidak memiliki akses terhadap

2. John Sudworth, "China's Hidden Camps," Tersedia di https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/China_hidden_camps, diakses pada 28 Juni 2019.
3. World Uyghur Congress, "Issue 16: Regulations of De-extremification", 31 Mei 2018, Tersedia pada <https://www.uyghurcongress.org/en/issue-16-regulations-of-de-extremification/>, diakses pada 28 Juni 2019. Regulasi Xinjiang Uyghur Autonomous Region on De-extremification terdiri dari 50 pasal yang terbagi ke dalam enam bagian. Bagian pertama yakni Ketentuan Umum yang terdiri atas delapan pasal, berisi tentang ketentuan dan tujuan regulasi secara umum. Bagian kedua berisi tentang penjabaran mengenai aksi atau tindakan apa saja yang tergolong sebagai tindakan ekstrimifikasi. Bagian ketiga berisi strategi Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Ekstremifikasi. Bagian keempat memuat poin-poin spesifik mengenai tugas-tugas pemerintah serta departemen yang terkait dalam rangka mengimplementasikan regulasi ini. Bagian kelima berisi tentang kewajiban yang harus dilaksanakan oleh berbagai aspek masyarakat dalam rangka mengimplementasikan regulasi ini. Serta bagian keenam yakni Tanggung Jawab Hukum yang mengiringi regulasi tersebut.
4. Xinjiang Uyghur Autonomous Region Regulation on De-extremification, "The International Uyghur Human Rights and Democracy Foundation", 31 Maret 2017, Tersedia di <http://www.uihrdf.org/content/xinjiang-uyghur-autonomous-region-regulation-de-extremification>, diakses pada 29 Juni 2019.
5. Concluding Observations of UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination: China, UN Doc. CERD/C/CHN/CO/14-17, 30 Agustus 2018, Tersedia di https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/CHN/CERD_C_CHN_CO_14-17_32237_E.pdf, diakses pada 4 Juli 2019.

pengacara atau memiliki hak untuk menentang keputusan tersebut. Akibatnya, penahanan di kamp dapat berlangsung dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kepastian tetap dari pihak berwenang untuk memutuskan kapan seorang individu dapat dikatakan telah selesai untuk “re-edukasi”.⁶

Selain penahanan yang dilaksanakan secara sewenang-wenang, tahanan yang sebagian besar adalah Muslim Uighur dihadapkan pada indoktrinasi politik dan menjalani proses asimilasi budaya secara keseluruhan dengan meninggalkan budaya aslinya. Mereka dipaksa untuk belajar bahasa Mandarin, menghafal ketentuan hukum dan lagu patriotik. Mereka yang menolak atau gagal untuk menunjukkan kemajuan pendidikannya, kerap menghadapi hukuman mulai dari pelecehan verbal, pengurangan makanan, kurungan, pemukulan serta berbagai jenis penyiksaan lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.⁷

Perbandingan Sikap OKI dalam Kasus Serupa

Respon lunak OKI terhadap pelanggaran HAM yang dialami Muslim Uighur di Xinjiang, mengundang tanda tanya besar. OKI tidak mampu bersikap pada kasus serupa yang terjadi di negara lain. Dalam studi yang dilakukan oleh Ibrahim Sharqieh⁸, ditemukan peran aktif OKI dalam menangani isu-isu marginalisasi yang dialami oleh kelompok Muslim. Sharqieh melakukan pengkajian pada empat studi kasus dimana OKI dianggap berpartisipasi secara intensif, yakni konflik di Filipina, Thailand, Irak, dan Somalia. Dalam konflik yang terjadi di Filipina, OKI berhasil membawa Pemerintah Filipina dan MNLF (*Moro National Liberation Front*) untuk melakukan mediasi yang berujung pada penandatanganan perjanjian damai. Selain itu, OKI juga berkoordinasi dengan IDB (*Islamic Development Bank*) dalam memberikan donasi untuk perbaikan infrastruktur di wilayah pasca konflik. Dalam konflik yang terjadi di Thailand selatan, upaya OKI fokus pada mediasi antar pihak yang berkonflik, melalui pemanfaatan

6. International Amnesty, “China: Where are they? Time for answers about mass detentions in the Xinjiang Uighur Autonomous Region”, 24 September 2018, Tersedia di <https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/9113/2018/en/>, diakses pada 5 Juli 2019.
7. G. Shih, “China’s Mass Indoctrination Camps Evoke Cultural Revolution”; Human Rights Watch, “Eradicating Ideological Viruses”; China’s Campaign of Repression Against Xinjiang’s Muslims (New York: Human Rights Watch, 2018), hlm. 33–36, Tersedia di www.hrw.org/node/322139, diakses pada 3 Juli 2019.
8. Ibrahim Sharqieh, “Can the Organization of Islamic Cooperation (OIC) Resolve Conflicts?”, *Peace and Conflict Studies*, Vol. 19 No. 2 (Januari 2012)

pengaruh diplomatik dengan pemerintah Thailand dan kredibilitas OKI dengan komunitas muslim. OKI berusaha keras untuk menghilangkan *stereotype* dan kesalahpahaman yang kerap menjadi hambatan menuju negosiasi dan dialog.

Dalam konflik di Somalia, OKI berpartisipasi dalam mendorong negosiasi hingga akhirnya berujung pada penandatanganan perjanjian Djibouti pada Agustus 2008. Pasca penandatanganan, OKI memberi bantuan secara finansial kepada Somalia untuk rekonstruksi pasca konflik. OKI juga meresmikan kantor kemanusiaan yang berkoordinasi dengan WFP (*World Food Program*), UNDP, dan UN-OCHA sebagai upaya untuk meningkatkan pemberian bantuan *humanitarian assistance* terhadap Somalia. Dan dalam konflik Irak, Sekretaris Jenderal OKI secara personal berusaha merangkul kelompok Sunni dan Syiah yang berkonflik untuk melakukan rekonsiliasi. Upaya ini berujung pada penandatanganan Deklarasi Mekah pada Oktober 2006. Dari keempat kasus tersebut, Sharqieh menilai bahwa terdapat kemampuan khusus yang dimiliki OKI sehingga dapat melakukan “intervensi” terhadap konflik-konflik yang terjadi. Kemampuan-kemampuan tersebut dapat diproyeksikan dalam tiga area, yakni kompetensi budaya, kekuatan moral, dan kemitraan.

Sebagai organisasi internasional yang membawa semangat solidaritas Islam, OKI memang tidak absen dalam isu yang dialami Muslim Uighur. OKI mengeluarkan pernyataan melalui forum-forum yang diselenggarakan. Namun, sikap yang OKI tunjukkan terkesan sebagai respon formal tanpa menyentuh hal yang menjadi kritik masyarakat internasional. Secara organisasional, terdapat sejumlah pernyataan dan forum OKI untuk sebagai indikasi lunaknya respon OKI terhadap isu HAM yang dialami Muslim Uighur di Xinjiang. Indikator pertama dapat dilihat dari pernyataan yang disampaikan di dalam pertemuan tetap ke-14 *Independent Permanent Human Rights Commission* (IPHRC), yang dilaksanakan pada 2–6 Desember 2018 di Jeddah, Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut, IPHRC memang melaporkan adanya kamp detensi yang dibangun oleh pemerintah China untuk etnis Uighur. IPHRC menyatakan, meskipun pemerintah China menyebut kamp ini sebagai pusat pendidikan dan pelatihan untuk memerangi ekstrimisme dan separatisme, namun kamp ini diduga telah mencederai HAM etnis Uighur yang dipaksa untuk mengikuti dan mengadopsi budaya dan praktik yang bertentangan dengan identitas asli etnis Uighur. Namun menariknya, temuan tersebut hanya berujung pada pernyataan harapan terhadap pemerintah China agar dalam upayanya memerangi terorisme, dapat tetap menjamin hak dan kebebasan beragama

bagi muslim Uighur.⁹

Indikator kedua yang menandai lunaknya respon OKI, bisa dilihat pada Resolusi Pertemuan Dewan Menteri Luar Negeri (*Council of Foreign Minister- CFM*) OKI ke-46, pada 1-2 Maret 2019 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dalam Resolusi pertemuan No.1/46-MM mengenai Perlindungan Hak-hak Komunitas dan Minoritas Muslim di Negara Non-anggota OKI, pada poin ke-20, disebutkan bahwa Dewan Menteri Luar Negeri OKI menyambut baik hasil dari kunjungan delegasi Sekretariat Jenderal OKI dalam rangka undangan dari pemerintah China. Poin tersebut juga menyebutkan penghargaan OKI terhadap kepedulian yang diberikan pemerintah China kepada masyarakat muslimnya. OKI, untuk selanjutnya, menantikan kerja sama yang lebih baik antara OKI dan pemerintah China. *“Welcomes the outcomes of the visit conducted by the General Secretariat’s delegation upon invitation from the People’s Republic of China; commends the efforts of the People’s Republic of China in providing care to its Muslim citizens; and looks forward to further cooperation between the OIC and the People’s Republic of China.”*¹⁰

Indikator ketiga, dapat dilihat dari hasil pertemuan tetap *Independent Permanent Human Rights Commission* (IPHRC) OKI ke-15. Tidak berbeda jauh dari pertemuan sebelumnya, IPHRC kembali menggaungkan pernyataan bernada positif atas keterlibatan aktif OKI dan pemerintah China dalam menangani masalah yang terjadi di Xinjiang. IPHRC menyampaikan perihal kunjungan OKI ke Xinjiang, menandai adanya upaya konstruktif OKI dalam penyelesaian isu Uighur. Menariknya, sekalipun IPHRC menyentuh isu hak-hak dasar beragama, namun IPHRC tidak secara tegas mengaitkannya dengan kebijakan Beijing.¹¹ *“During the discussion in its Working Group on Islamophobia and Muslim minorities, the Commission appreciated the active engagement and holding of consultations between OIC and the Chinese government on all issues of common concern including the situation of Uyghur Muslims in Xinjiang. IPHRC welcomed the OIC visit to different parts of China including Xinjiang as a step-in right direction that enables transparent and constructive engagement. It encouraged both sides to continue to engage positively with a view to discussing and addressing all issues of mutual interest/ concern, including protection of the rights of Uyghur Muslims, in an open and constructive fashion. It was stressed that*

9. OIC Independent Permanent Human Rights Commission, “14th Regular Session,” 6 Desember 2018, Tersedia di https://www.oiciphrc.org/en/data/docs/session_reports/14th/14th%20Session%20Concluding%20Press%20Statement_EV.pdf, diakses pada 7 Juli 2019.

10. Organisation of Islamic Cooperation, “46th Session of The Council of Foreign Ministers,” Tersedia di <https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=4447&refID=1250>, diakses pada 20 Juli 2019

11. OIC Independent Permanent Human Rights Commission, “15th Regular Session,” 25 April 2019, Tersedia di https://www.oic-iphrc.org/en/press_details.php?id=SVBIUKMxNXRoQ1BSX0AJIUA, diakses pada 5 Juli 2019.

the freedom of religion is a fundamental right, practice of which should not be construed as a source of radicalization.”

Dari tiga sikap resmi OKI tersebut, jelas terlihat lunaknya respon OKI terhadap isu krisis kemanusiaan Uighur. Hal tersebut jauh berbeda dengan respons OKI dalam menyikapi isu Rohingya di Myanmar, isu Patani Selatan di Thailand, Somalia, ataupun isu-isu terorisme beruntun di beberapa negara lainnya yang langsung mendapat perhatian penuh dari OKI. Berbeda pula, upaya-upaya OKI sebagaimana yang dipaparkan dalam studi Ibrahim Sharqieh sebagaimana paparan di atas, tidak terlihat dalam isu marginalisasi yang dialami Muslim Uighur. Disamping itu, lunaknya respon OKI juga tercermin dari kurangnya upaya OKI untuk mengekspos informasi mengenai Uighur di berbagai sumber informasi resmi yang dimiliki OKI. Pada kunjungan delegasi OKI ke Xinjiang, misalnya, OKI hanya melaporkan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan dan berencana untuk meningkatkan koordinasi dengan China mengenai permasalahan Uighur. Pernyataan tersebut dikeluarkan OKI dalam pertemuan tetap IPHRC ke-15. Diluar pernyataan tersebut, OKI tidak mengeluarkan laporan atau *press release* apapun mengenai situasi dan kondisi lapangan dari kamp re-edukasi di Xinjiang, yang sejatinya sangat krusial untuk dipublikasikan oleh OKI sebagai satu-satunya organisasi antarpemerintah yang diberi akses memasuki kamp di Xinjiang. Hal ini membuat OKI terkesan menutup-nutupi kabar terkini terkait krisis kemanusiaan Uighur.

Agenda Palestina dan Kepentingan Ekonomi-Politik Negara OKI

Minornya suara OKI terhadap isu Muslim Uighur tentu mengundang pertanyaan masyarakat internasional. Faktor apakah yang membentuk OKI untuk mengambil sikap yang demikian lunak terhadap pemerintah China dalam isu muslim Uighur? Padahal, dalam piagam pembentukan OKI pasal 1 ayat 16, tercantum ketentuan yang mengatur tanggung jawab OKI untuk membela permasalahan minoritas muslim di negara yang bukan merupakan anggota OKI. Artikel ini berargumen bahwa lunaknya sikap OKI terhadap isu muslim Uighur dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor hubungan tradisional OKI dan Pemerintah China, yang diikat agenda Palestina, dan jalinan kepentingan ekonomi antara China dan negara-negara anggota OKI. Faktor pertama yang bisa menjelaskan lunaknya

respon OKI terhadap isu muslim Uighur, dipengaruhi oleh latar belakang hubungan tradisional yang dimiliki oleh OKI dan China. Sementara, salah satu hal yang mengikat kuat hubungan OKI dan China adalah kesamaan posisi politik kedua pihak terhadap agenda Palestina di Timur Tengah.

Sebagai satu-satunya organisasi internasional yang terbentuk berdasarkan semangat identitas agama, OKI lahir dari hasil konferensi Rabat, yang diselenggarakan untuk merespon peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa pada 21 Agustus 1969. Konferensi tersebut, dihadiri oleh 25 pemimpin dan perwakilan negara islam dan negara muslim dari total 36 negara yang diundang. Konferensi ini menghasilkan Deklarasi Rabat yang berisi komitmen negara-negara Islam untuk meningkatkan solidaritas Islam, mengoordinasikan kerja sama antara negara-negara islam, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, dan melindungi tempat suci Islam dan membantu perjuangan untuk pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Terlebih dengan posisi China sebagai pemegang hak veto di Perserikatan Bangsa Bangsa, China selalu mengambil posisi yang sejalan dengan agenda-agenda OKI, terutama dalam memperjuangkan isu-isu Palestina.

Dengan demikian, isu dan agenda kemerdekaan Palestina merupakan salah satu prioritas utama dalam kerangka kerja OKI. Sejalan dengan hal tersebut, China merupakan negara yang sangat proaktif mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan, China telah menjadi pendukung terkemuka dari *Palestinian Liberation Organization* (PLO) sejak pendirian PLO pada 1964. Sebagai salah satu negara pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB, China menunjukkan dukungannya dengan menyetujui berbagai resolusi PBB mengenai mosi penentuan nasib sendiri (*self-determination*) bagi Palestina dan mengutuk pendudukan Israel di wilayah Palestina. Pada 2012, China juga memberikan dukungan politiknya terhadap Palestina untuk menjadi negara pengamat non-anggota PBB (*UN non-member observer state*). China juga menunjukkan upaya retorik dalam mendorong upaya-upaya penyelesaian diplomatik terhadap konflik Israel-Palestina melalui usaha untuk meningkatkan legitimasi internasional Hamas sebagai aktor politik. Bahkan di sektor ekonomi, China berkomitmen kuat untuk meningkatkan investasi keuangan di Palestina pada bidang energi matahari dan infrastruktur, untuk meningkatkan profil Palestina di mata dunia sebagai negara-negara yang layak secara ekonomi.¹² Adanya kesamaan posisi inilah, yang memperkuat jalinan hubungan OKI dan China.

12. Samuel Ramani, "Why Palestine Supports China on the South China Sea", *The Diplomat*, 26 Juli 2016, Tersedia di <https://thediplomat.com/2016/07/why-palestine-supports-china-on-the-south-china-sea/>, diakses pada 5 Juni 2019.

Di lain pihak, Amerika Serikat yang saat ini menjadi negara yang memotori kecaman terhadap pelanggaran HAM China di Uighur, merupakan aktor yang selalu berseberangan dengan kepentingan OKI. Bahkan menjadi sekutu abadi bagi Israel. Selama beberapa dekade, AS telah membela Israel dan melindunginya dengan kekuatan hak veto yang dimiliki AS sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sejak tahun 1970, AS tercatat telah memveto 43 resolusi di Dewan Keamanan PBB yang mengkritik Israel atau mengancam tindakan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Terutama di bawah pemerintahan Trump, AS tidak hanya membela Israel tapi mengancam secara ofensif negara yang berseberangan dengan kebijakannya dengan menghentikan bantuan internasional (aid) AS bagi negara tersebut. Pada 2019, Trump kembali mengeluarkan keputusan kontroversial terkait konflik Palestina-Israel, yakni memindahkan kedutaan besar AS untuk Israel ke Jerusalem, sekaligus secara sepihak mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel.¹³

Dengan posisi politik yang berseberangan antara AS dan China terhadap isu Palestina yang menjadi agenda utama OKI, maka lunaknya respon OKI dalam isu pelanggaran HAM yang dialami muslim Uighur. Sikap OKI ini dinilai akan berbeda jika pihak yang dipermasalahkan AS bukanlah China. Hal ini dibuktikan dengan kasus-kasus serupa yang juga melibatkan OKI dalam penyelesaiannya. Misalnya dalam isu Rohingya di Myanmar dan isu Patani di Thailand bagian selatan, dimana OKI memberikan tekanan yang keras kepada Myanmar dan Thailand. Berangkat dari argumen tersebut, penelitian ini menilai bahwa lunaknya respon OKI dalam isu muslim Uighur, dipengaruhi hubungan tradisional yang dimiliki antara OKI dan China yang sangat sejalan dalam isu perjuangan kemerdekaan Palestina. Di lain pihak, AS yang selalu ofensif terhadap Palestina, yang merupakan wujud keberpihakan AS terhadap Israel, tentunya berpengaruh dalam merenggangkan hubungan antara OKI dan AS.

Faktor kedua terkait dengan kepentingan ekonomi yang sedang terjalin antara negara-negara anggota OKI dengan pemerintah China. Terutama, sejak 2013 dimana Pemerintah China memulai agenda besar *One Belt One Road* (OBOR), sebagai payung pembangunan infrastruktur yang menghubungkan China dengan perekonomian dunia. Melalui mega proyek ini, China merangkul berbagai negara, termasuk negara-negara anggota OKI, untuk meningkatkan kerja sama ekonominya. Upaya China menjadikan Timur Tengah sebagai salah satu fokus kebijakan ekonominya

13. Jumana Al Tamimi, "US has long history of shielding Israel at the UN," 22 Januari 2018, Tersedia di <https://gulfnnews.com/world/mena/us-has-long-history-of-shielding-israel-at-the-un-1.2160853>, diakses pada 4 Juni 2019.

tercermin dari dua dokumen yang dikeluarkan oleh Beijing, yaitu, 2016 Arab Policy Paper dan 2015 Vision dan Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road.¹⁴ Melalui dua dokumen ini, China menegaskan prinsip “developmental peace” yang menekankan pada pendekatan non-intervensi, *partnerships*, dan *mutual benefit* terhadap negara-negara Timur Tengah dalam menjalankan kebijakan kerja sama ekonominya.

Sehingga, ketika terdapat permasalahan yang dipandang sebagai problem internal, China dan negara-negara Timur Tengah kembali kepada prinsip tersebut demi menjaga keutuhan dan kelangsungan kerja sama ekonomi yang sudah terjalin. Dan hal inilah yang tercermin dalam posisi dan respon negara Timur Tengah dalam menyikapi permasalahan Muslim Uighur di Xinjiang. Kerja sama ekonomi menjadi instrument strategis China dalam menjaga hubungan tradisional dengan negara-negara di Timur Tengah yang memegang peranan strategis di dalam OKI, terutama jika dilihat dari kontribusi finansial. Arab Saudi saat ini, misalnya, merupakan eksportir minyak kedua terbesar untuk China. Bahkan, tahun 2019 ini kedua negara kembali menandatangani kerja sama senilai US\$10 miliar dibidang penyulingan dan petrokimia setelah sebelumnya menandatangani investasi senilai US\$65 miliar untuk pembangunan kilang minyak di Tiongkok di tahun 2017.¹⁵ Selain Arab Saudi, Iran juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan China, tidak hanya pada aspek ekonomi namun juga militer. Bagi Iran, China saat ini telah berkembang menjadi mitra dagang terbesar kedua, sekaligus menjadi pemasok senjata militer utama bagi Iran sejak 1986.¹⁶ Iran dan China juga memiliki kerja sama yang cukup intensif untuk bidang kontra terorisme yang ditandatangani keduanya pada November 2016.¹⁷ Sedangkan Kuwait, UEA, serta Turki merupakan partner dekat China dalam proyek *one belt one road*.

14. “Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road”, Maret 2015. Tersedia di http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html, diakses pada 8 Juli 2019.

15. “Saudi Aramco Teken Kesepakatan Investasi US\$10 M dengan China”, 22 Februari 2019, Tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190222165707-85-371886/saudi-aramco-teken-kesepakatan-investasi-us-10-m-dengan-china>, diakses pada 7 Juni 2019.

16. Mercy A. Kuo, “US-Iran Tensions: Impact on China-Iran Ties”, *The Diplomat*, 3 Juni 2019, Tersedia di <https://thediplomat.com/2019/06/us-iran-tensions-impact-on-china-iran-ties/>, diakses pada 8 Juni 2019.

17. Mercy A. Kuo, “US-Iran Tensions: Impact on China-Iran Ties”, *The Diplomat*, 3 Juni 2019, <https://thediplomat.com/2019/06/us-iran-tensions-impact-on-china-iran-ties/>

Kesimpulan

Artikel ini dilatarbelakangi oleh lunaknya respon OKI terhadap perlakuan diskriminatif yang dialami Muslim Uighur. Sebagai organisasi yang membawa semangat solidaritas muslim dunia, sikap lunak OKI terhadap perlakuan diskriminatif pemerintah China terhadap Muslim Uighur, tentunya mengundang tanda tanya besar. Tidak hanya itu, pertanyaan terhadap lunaknya sikap OKI dikarenakan OKI memiliki riwayat yang cukup banyak untuk berkontribusi dalam penyelesaian tindakan diskriminatif yang dialami umat Islam di berbagai negara. Seperti konflik di Thailand Selatan, Bosnia, hingga Filipina. Namun dalam isu Uighur, OKI mengambil sikap yang berbeda. Lunaknya respon OKI, selain tercermin pada pernyataan resmi yang tidak beranada kritik apalagi kecaman terhadap China, juga terlihat dari kurangnya upaya OKI untuk mengekspos informasi mengenai Uighur di berbagai sumber informasi resmi yang dimiliki OKI. OKI juga tidak mengeluarkan laporan atau press release apapun mengenai situasi dan kondisi lapangan dari kamp re-edukasi di Xinjiang, yang sejatinya sangat krusial untuk dipublikasikan oleh OKI sebagai satu-satunya organisasi antarpemerintah yang diberi akses memasuki kamp di Xinjiang.

Untuk memahami respon OKI tersebut, artikel ini berargumen bahwa lunaknya sikap OKI dipengaruhi setidaknya oleh dua hal. Pertama, dikarenakan faktor hubungan tradisional antara OKI dan China, terutama dalam kesamaan posisi dalam memperjuangkan isu Palestina. Kedua, dipengaruhi oleh faktor kerja sama ekonomi yang dimiliki China dengan negara-negara anggota OKI. Lebih lanjut, artikel ini memandang prinsip pembangunan damai atau "developmental peace" yang China kedepankan dalam hubungan ekonomi di Timur Tengah, menjadi kerangka nilai yang membatasi tindakan apapun yang dapat mencederai kerja sama ekonomi China dan negara-negara Timur Tengah.

Sebagai sebuah rekomendasi, artikel ini memandang bahwa dalam isu pelanggaran HAM yang dialami Muslim Uighur, OKI memang menghadapi posisi yang cukup dilematis, antara menjalankan tanggung jawab moral sebagai organisasi solidaritas muslim dunia atau menjaga hubungan baik dengan China sebagai mitra strategis OKI. Namun, dengan pilihan sikap yang tidak tegas, justru mengancam relevansi OKI sebagai sebuah organisasi yang membawa semangat solidaritas muslim dunia. Hendaknya OKI dapat tetap konsisten dengan nilai-nilai yang dibawa sebagai organisasi dan tidak terpecah tujuan dikarenakan kepentingan

beberapa negara anggota saja. OKI semestinya dapat merepresentasikan suara solidaritas masyarakat muslim dibanding suara negara muslim. OKI harus mampu bersikap tegas terhadap isu-isu yang sudah diatur di dalam piagam OKI. Sebab dengan mengacu pada konstitusinya, OKI memiliki tanggung jawab moral sekaligus tanggung jawab politik untuk membela masyarakat muslim yang menjadi kelompok minoritas di negara bukan anggotanya.

Daftar Pustaka

- “Nearly two dozen countries unite at UN to condemn China’s mass detention of one million Muslims for first time,” 10 Juli 2019, Tersedia di <https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-muslim-detention-centres-xinjiang-un-security-council-letter-a8999236.html>, diakses pada 12 Maret 2019.
- “Saudi Aramco Teken Kesepakatan Investasi US\$10 M dengan China”, 22 Februari 2019, Tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190222165707-85-371886/saudi-aramco-teken-kesepakataninvestasi-us-10-m-dengan-china>, diakses pada 7 Juni 2019.
- Al Tamimi, Jumana. “US has long history of shielding Israel at the UN,” 22 Januari 2018, Tersedia di <https://gulfnnews.com/world/mena/us-has-long-history-of-shielding-israel-at-the-un-1.2160853>, diakses pada 4 Juni 2019.
- Concluding Observations of UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination: China, UN Doc. CERD/C/CHN/CO/14-17, 30 Agustus 2018, Tersedia di https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/CHN/CERD_C_CHN_CO_14-17_32237_E.pdf, diakses pada 4 Juli 2019.
- International Amnesty, “China: Where are they? Time for answers about mass detentions in the Xinjiang Uighur Autonomous Region”, 24 September 2018, Tersedia di <https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/9113/2018/en/>, diakses pada 5 Juli 2019.
- Kuo, Mercy A., “US-Iran Tensions: Impact on China-Iran Ties”, The Diplomat, 3 Juni 2019, Tersedia di <https://thediplomat.com/2019/06/us-iran-tensions-impact-on-china-iran-ties/>, diakses pada 8 Juni 2019.

- OIC Independent Permanent Human Rights Commission, "15th Regular Session," 25 April 2019, Tersedia di https://www.oiciphrc.org/en/press_details.php?id=SVBIUkMxNXRoQ1BSX0AjiUA, diakses pada 5 Juli 2019.
- OIC Independent Permanent Human Rights Commission, "14th Regular Session," 6 Desember 2018, Tersedia di https://www.oiciphrc.org/en/data/docs/session_reports/14th/14th%20Session%20Concluding%20Press%20Statement_EV.pdf, diakses pada 7 Juli 2019.
- Organisation of Islamic Cooperation, "46th Session of The Council of Foreign Ministers," Tersedia di <https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=4447&refID=1250>, diakses pada 20 Juli 2019.
- Ramani, Samuel. "Why Palestine Supports China on the South China Sea", *The Diplomat*, 26 Juli 2016, Tersedia di <https://thediplomat.com/2016/07/why-palestine-supports-china-on-the-south-china-sea/>, diakses pada 5 Juni 2019.
- Shih, G. "China's Mass Indoctrination Camps Evoke Cultural Revolution"; Human Rights Watch, "Eradicating Ideological Viruses": China's Campaign of Repression Against Xinjiang's Muslims (New York: Human Rights Watch, 2018), hlm. 33–36, Tersedia di www.hrw.org/node/322139, diakses pada 3 Juli 2019.
- Sharqieh, Ibrahim. "Can the Organization of Islamic Cooperation (OIC) Resolve Conflicts?", *Peace and Conflict Studies*, Vol. 19 No. 2 (Januari 2012)
- Sudworth, John. "China's Hidden Camps," Tersedia di https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/China_hidden_camps, diakses pada 28 Juni 2019.
- World Uyghur Congress, "Issue 16: Regulations of De-extremification", 31 Mei 2018, Tersedia pada <https://www.uyghurcongress.org/en/issue-16-regulations-of-de-extremification/>, diakses pada 28 Juni 2019.
- Xinjiang Uyghur Autonomous Region Regulation on De-extremification, "The International Uyghur Human Rights and Democracy Foundation", 31 Maret 2017, Tersedia di <http://www.iuhrdf.org/content/xinjiang-uyghur-autonomous-region-regulation-de-extremification>, diakses pada 29 Juni 2019.
- "Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road", Maret 2015. Tersedia di http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html, diakses pada 8 Juli 2019.